

KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PUD) PASAR KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS : PASAR SEI SIKAMBING, KECAMATAN MEDAN HELVETIA)



^{1*}Veronica Butarbutar, ²Mohammad Ridwan

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara - Indonesia

e-mail:

^{1*}veronicabutarbutar21@gmail.com (corresponding author)

²rangkuti.09@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the performance of the Medan City Regional Public Market Company in managing the Sei Sikambing traditional market. This research is useful for providing information so that the municipalities can manage traditional markets and optimize market levy revenues to increase Regional Original Income. This research uses descriptive research using qualitative analysis. Data collection techniques through observation, documentation, interviews, and literature review. The results of this study show that Medan City Market Regional Public Company is not optimal for the management of the Sei Sikambing market. It shows performance indicators, namely productivity, service quality, and responsiveness. Productivity indicators are still not optimal because there are still some obstacles that have not been resolved, so the marketing fee revenue target has not been met. The quality of the services provided is sufficient but needs to be improved by improving market facilities and infrastructure that support improving service quality. Responsiveness is still less than optimal because all the needs required by traders cannot be fully addressed. Apart from that, the Medan City Market Regional Public Company faces several obstacles in managing the market, namely: 1) There are no regional regulations that have been passed regarding the management of street vendors, 2) the implementation of the duties of each market management authority is still not optimal, 3) the budget is not optimal. limited in supporting traditional market management.

Keywords: Public Management; Performance; Regional Public Company; Service Quality; Productivity

Diterima (Received) : 15-11-2023

Direvisi (Revised) : 31-12-2023

Disetujui (Approved) : 16-06-2024

Dipublikasi (Published) : 11-07-2024



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Secara umum, banyak pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan yang semakin nyata dan aspirasi taraf hidup masyarakat merupakan permasalahan yang harus diwaspadai oleh pemerintah kota. Menurut Caroliner (2010), Pemerintah daerah Wakil/Kota harus mampu menggali peluang pembangunan dan batasan daerahnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Potensi daerah yang digali dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah jual beli, yang memerlukan adanya pasar.

Pasar adalah sebuah alat yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk berdagang. Pasar tidak memiliki batasan geografis karena tidak terbatas dan berfokus pada lokasi dan lokasi tertentu. Dengan perkembangan teknologi saat ini, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan hambatan atau batasan geografis serta batasan pertemuan atau pertemuan tatap muka dapat dihilangkan (Sukirno, 2011). Menurut Stanton (2000), pasar juga diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai uang dan kepuasan serta kemauan untuk membelanjakannya. Di era globalisasi yang semakin pesat, perlu adanya pengelolaan pasar khususnya pasar tradisional agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Salah satu penyebab pasar tradisional tidak berkembang saat ini adalah buruknya pengelolaan pasar tradisional, buruknya kondisi kebersihan pasar, dan kurangnya layanan pendukung. Fakta ini membuat para pengunjung pasar tradisional berpindah ke pasar modern, yang di dalamnya terdapat produk-produk berkualitas dan pelayanan yang menyenangkan.

Pengelolaan pasar harus terus ditingkatkan, karena tujuan pengelolaan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan menjadikan pasar tradisional mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Komersial no. 21/2021 memuat instruksi kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan desa, koperasi dan/atau swasta untuk merangsang atau mengelola pembangunan/pasar dan dunia usaha. Tujuan diadakannya pasar tradisional adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mendefinisikan pengelolaan pasar tradisional sebagai pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Agar pasar dapat berfungsi dalam keseimbangan, diperlukan pengendalian. Tujuan dari pemerintahan ini adalah untuk menciptakan pasar yang dapat membuat pedagang kaya tanpa penipuan. Manajemen meliputi pengkoordinasian dan pengarahan pekerjaan orang lain agar pekerjaan terlaksana secara efisien dan efektif (Luluk, 2019). Mengelola pasar adalah tugas pegawai negeri. Dalam pelaksanaannya tentu saja tidak diatur langsung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi yang sebesar-besarnya untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pemerintahannya. kesejahteraan dengan memperbaikinya. pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. UU No. 23/2014 Menurut Pemerintahan daerah, pemerintah daerah tidak harus membentuk Badan Hukum Umum Daerah (BUMD), namun BUMD adalah suatu keadaan yang menurutnya daerah menjadi sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu wilayah di Indonesia yang diberikan yurisdiksi adalah Kota Medan. Kota Medan merupakan sebuah kota besar di Sumatera Utara. Penduduk Kota Medan sebagian besar berprofesi sebagai wirausaha, baik di pertokoan maupun di mall, mall dan pasar

yang ada di wilayah Kota Medan. Berdasarkan data Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan terdapat 54 pasar tradisional di Kota Medan. Pasar tradisional tersebut terdiri data 36 pasar yang memiliki bangunan dan 15 pasar yang tidak memiliki bangunan. Ada 4 pasar yang tidak di kelola oleh PUD Pasar Kota Medan yaitu: Jl. Bulan, Jl. Pagaruyung, Jl. Semarang dan Jl. Jangka. Pasar tradisional yang tersebar di beberapa wilayah tidak lepas dari berbagai permasalahan dalam penataan dan pembinaan usaha pasar tradisional tersebut. Salah satunya yaitu Pasar Tradisional Sei Sikambang.

Lokasi Pasar Tradisional Sei Sikambang yang berdekatan dengan sejumlah pasar modern menjadi tantangan tersendiri. Hal ini karena pasar modern sering mmemberi potongan harga sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli kebutuhan keluarga di pasar modern. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.

Berikut adalah realisasi penerimaan anggaran baik secara harian maupun bulanan di Pasar Seikambang :

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pasar Anggaran 2022 Pasar Sei Sikambang Wilayah Cabang-II

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi
1	Piutang tempat berjualan Bulanan	Rp. 210.000.000	Rp. 94.696.700
2	Tempat berjualan harian	Rp. 75.600.000	Rp. 78.788.900
3	Tempat berjualan bulanan	Rp. 449.424.000	Rp. 292.348.800
4	Kebersihan harian	Rp. 249.552.000	Rp. 239.703.600
5	Kebersihan bulanan	Rp. 18.360.000	Rp. 6.175.000
6	Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan	Rp. 72.000.000	Rp. 65.826.700
7	Bea balik nama	Rp. 18.000.000	Rp. 16.061.000
8	Fasilitas dan prasarana	Rp. 8.400.000	Rp. 2.500.000
9	Sewa menyewa	Rp. 1.200.000	Rp. 2.100.000
10	Jasa Parkir	Rp. 78.000.000	Rp. 171.000.000
11	Jasa Jaga Malam	Rp. 117.000.000	Rp. 128.500.000
12	Retribusi WC	Rp. 21.600.000	Rp. 26.100.000

Sumber: PUD Pasar Kota Medan, 2023

Berdasarkan keterangan pada Tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di Pasar Sei Sikambang selama ini adalah Pemerintah Kota Medan masih belum mampu meningkatkan pendapatan PAD termasuk retribusi daerah khususnya retribusi pasar. Dikatakannya, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pasar Sei Sikambang, perbedaan pajak dengan pelaksanaannya karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar sewa toko dan warung. Selain itu, pengelolaan pasar Sei sikambang masih perlu diperhatikan terutama dalam hal sampah. Pasar Sei Sikambang hanya menyediakan tempat pembuangan sampah di luar, dan tidak rutin di angkut sehingga menimbulkan bau sampah yang menyengat dan banyak lalat. Hal ini diungkapkan seorang penjual di Pasar Sei Sikambang, mengatakan:

“Kondisi di dalam pasar sudah bagus tiap hari di sapu kok, hanya saja tumpukan sampah yang ada di TPA jarang diangkut sehingga menimbulkan bau bagi pembeli.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Emma, 23 Maret 2023)

Selain permasalahan tersebut, masih ada permasalahan lain diantaranya adalah apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana di Pasar Sei Sikambing tidak ditangani cepat oleh pihak PUD Pasar, Lokasi parkir yang sempit membuat pelanggan harus memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, sehingga sering kali menimbulkan kemacetan dikarenakan kondisi jalan,

Beberapa hal itu membuktikan bahwa pengelolaan Pasar Sei Sikambing masih minim. Meskipun pasar ini sudah dilakukan revitalisasi sejak tahun 2015 tetapi belum mampu menaikkan retribusi pasar diakibatkan permasalahan pengelolaan pasar yang belum terselesaikan. Penyebab umum yang dapat kita tarik dari kurang baiknya pengelolaan pasar adalah tidak adanya kesadaran dari semua pihak. Bermula dengan masalah sampah dan sarana dan prasarana yang tidak ditangani dengan baik, kesadaran membayar retribusi rendah, kemampuan pengelola pasar yang terbatas, dan lain-lain.

Banyaknya masalah yang terjadi di Pasar Sei Sikambing tentu memiliki dampak besar yang berpengaruh pada perekonomian. Pengelolaan pasar memerlukan intervensi negara, karena kesejahteraan masyarakat dicapai melalui intervensi negara. Merujuk pada Perwal Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah. Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan merupakan lembaga pengelola pasar tradisional. Dengan demikian, kinerja PUD Pasar Kota Medan dalam hal ini sangat penting mengingat fungsi dan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya bidang pengelolaan pasar tradisional Kota Medan. Sebagai lembaga pengelola pasar tradisional, PUD Pasar terpaksa harus memaksimalkan kinerjanya.

Pemerintah Kota Medan berupaya melestarikan dan mengembangkan pasar tradisional melalui pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan atau pemeliharaan pasar, dan pembiayaan seperti pendanaan dan tujuan PAD. Permasalahan yang terjadi di Pasar Sei Sikambing, menandakan bahwa pemerintah Kota Medan melalui Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan belum melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka perlu diteliti tentang kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan dalam pengelolaan pasar tradisional dengan melakukan studi kasus di Pasar Sei Sikambing, Kecamatan Medan Helvetia.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen

Handoko (2009:8) mengartikan “manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi dan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan”. Sedangkan menurut Hasibuan (2013:1), “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien”. Kepemimpinan bisa disebut intangible karena tidak terlihat, namun hasilnya nyata, yaitu hasil kerja yang memadai, kepuasan pribadi, produk dan layanan yang lebih baik (Terry, 1992). Terry (1992:8) juga menyatakan bahwa “manajemen mempunyai empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian”. Keempat fungsi kontrol ini secara singkat dikenal sebagai POAC.

Manajemen Publik

Menurut Overman (dalam Keban, 2004: 85), “administrasi publik adalah studi multidisiplin mengenai aspek umum organisasi dan kombinasi kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian di satu sisi dengan sumber

daya manusia, keuangan dan fisik. di sisi lain, informasi dan politik". Sementara itu, menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93), administrasi publik diartikan sebagai "usaha seseorang untuk bertanggung jawab atas pengelolaan suatu organisasi". Administrasi publik atau yang sering juga sering disebut dengan "administrasi publik adalah upaya negara untuk memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada" (Ghofur: 2014), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi publik menitikberatkan pada bagaimana organisasi publik melaksanakan kebijakan. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan merupakan alat yang paling penting dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik atau publik.

Kinerja Organisasi

Menurut Moehariono (2012), "hasil adalah gambaran tingkat pencapaian suatu program tindakan atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi melalui perencanaan strategis organisasi." Namun menurut Mahsun (2006:25), "hasil merupakan gambaran tingkat pelaksanaan kegiatan/program dalam pelaksanaan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi dalam perencanaan strategis organisasi." Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah hasil nyata dari suatu organisasi, lembaga atau perusahaan berdasarkan nilai-nilai, tujuan atau visi dan misinya yang ditentukan oleh misi, program dan tugas, kegiatan serta amanat dan fungsinya.

Menurut Dwiyanto (2006) mengukur kinerja birokrasi publik adalah dengan menggunakan indikator:

1. Produktivitas
Produktivitas mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan dengan membandingkan input dengan output.
2. Kualitas Layanan
Kualitas layanan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai indikator kinerja organisasi.
3. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk dapat mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas masyarakat dengan mengembangkan program-program pelayanan public dan menyesuaikan kebutuhan public serta aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilaksanakan menurut asas administrasi yang baik dan benar dengan kebijakan organisasi dan dalam pelaksanaan tugas serta peranan pengawas dalam pelaksanaan tugas.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas public menunjukkan seberapa besar tanggung jawab kepada pimpinan maupun kepada pusat daerah terkait hasil kerja yang diperoleh dalam kegiatan organisasi public dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan public

Pasar Tradisional

Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) suatu barang atau jasa tertentu, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan harga keseimbangan (harga pasar) dan volume yang diperdagangkan (Widoatmodjo, 2015). Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat

bertemuinya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi atau perundingan secara langsung, bangunan terdiri dari lapak, los, akses yang lebih luas kepada produsen dan lapangan terbuka bagi penjual dan pemimpin pasar (Aziz, 2008). Dapat disimpulkan bahwa pasar juga berfungsi sebagai ruang publik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sebagian besar usahanya terdiri dari kebutuhan sehari-hari dan harga yang relatif murah.

Perusahaan Milik Daerah

Menurut Manullang (1996) dalam (Tangkillisan, 2005) menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah, dimana tujuan utama Badan Usaha Daerah bukanlah mencari keuntungan, melainkan menghasilkan jasa-jasa dan menghasilkan pelayanan umum serta mengembangkan perekonomian daerah. cara ini. bahwa perusahaan daerah mempunyai dua tugas, maka keseimbangan antara kegiatan sosial dan ekonomi harus terjamin”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016), purposive sampling adalah suatu teknik pemilihan data berdasarkan aspek-aspek tertentu dimana peneliti menentukan terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai dan siapa yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diinginkan. belajar Alasan penggunaan teknik purposive sampling adalah untuk mengumpulkan data secara objektif, dengan asumsi data yang dikumpulkan mewakili peneliti, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam SNI 8152:2021 terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pasar rakyat Indonesia, yaitu: syarat umum yang meliputi lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan, kemudian syarat teknis yang meliputi pasar dan aksesibilitas. dan zonasi, inspeksi lokasi pengukuran dan konsultasi akhir, terakhir persyaratan pengelolaan yang mencakup prinsip pengelolaan pasar, pemberdayaan pedagang, dan pengembangan pasar. Namun Pasar Sei Sikambing belum menerapkan persyaratan penerapan SNI 8152:2021. Untuk melihat bagaimana kinerja PUD Pasar Kota Medan dalam pengelolaan pasar tradisional digunakan indikator kinerja Dwiyanto (2006:5) yaitu produktivitas, kualitas pelayanan dan daya tanggap.

Produktivitas

Menurut Dwiyanto (2006:5), “produktivitas pada dasarnya dipahami sebagai hubungan antara input dan output”. Suatu organisasi dianggap produktif ketika mencapai tujuannya dan hal ini dilakukan dengan mengubah input menjadi output dengan biaya. Dalam penelitian ini produktivitas PUD Pasar Kota Medan memasukkan pelayanan sebagai indikator kinerja penting dengan hasil yang diharapkan. PUD Pasar Kota Medan berupaya menjadi penyelenggara dan pengawas kegiatan teknis operasional pengelolaan pembayaran pasar dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan dengan kepala bagian perencanaan dan pengembangan pemasaran, tujuan organisasi pemasaran adalah meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui pelayanan yang baik dan bermutu. Jadi dapat disimpulkan bahwa PUD Pasar Kota Medan bertujuan untuk melayani masyarakat dengan baik dan berkualitas, seperti pelayanan yang cepat, sehingga dengan meningkatkan pelayanan tersebut pembeli merasa puas ketika berbelanja di pasar tradisional.

Diperlukan hasil yang benar-benar baik dalam pemungutan pajak agar dapat efisien dan efektif dalam memungut pembayaran serta dapat memuaskan masyarakat sebagai pelanggan. Namun, layanan penggajian seringkali tidak efisien dan efektif karena terbatasnya dana, personel, dan peralatan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pasar, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya pembayaran retribusi pasar, seperti keterlambatan pembayaran retribusi oleh pedagang, faktor cuaca dan kepercayaan petugas dalam memungut retribusi.

Responsivitas

Mengukur efektivitas birokrasi publik tidak cukup dari segi metrik terkait birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, namun juga diukur dari metrik terkait pengguna layanan seperti kepuasan, akuntabilitas, dan daya tanggap pengguna layanan (Dwiyanto, 2006). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pasar Sei Sikambang dapat disimpulkan bahwa pengelola pasar melaksanakan pengelolaan pasar sesuai dengan tugas pokok dan tugasnya, sehingga memudahkan pengalihan imbauan dan pengaduan terkait pengelolaan pasar oleh para pedagang. . . dan pengunjung pasar. Sikap ramah tamah ini tentunya sangat penting untuk menyusun kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga setiap permasalahan dapat cepat terselesaikan dan juga memberikan kepuasan bagi para pedagang dalam memenuhi kebutuhannya. pengelolaan pasar dimana instansi terkait merespon dengan cepat kebutuhan pedagang untuk menjaga pasar tetap sibuk dan mampu menjalankan fungsi pasar tradisional, yaitu. memahami fungsi dan peran pasar tradisional yang unik dan kompetitif. termasuk dalam perencanaan manajemen pemasaran tradisional.

Berdasarkan keluhan para pedagang dan pengunjung pasar, keinginan dan keluhan mereka tidak tersampaikan sepenuhnya karena organisasi pengawas perdagangan tidak mencakup seluruh pedagang. Respon pemerintah melalui instansi terkait terkoordinasi dengan baik, namun respon terhadap keluhan pedagang masih rendah. Hal ini terlihat dari lambatnya penanganan kawasan yang rusak, kurangnya strategi pemerintah dalam pengembangan pasar, sehingga pasar tradisional sangat sepi, harga sewa kios yang mahal tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh pedagang.

Kualitas Layanan

Menurut Dwiyanto (2006), Keuntungan penting dari penggunaan kepuasan masyarakat sebagai ukuran hasil adalah bahwa informasi tentang kepuasan masyarakat seringkali tersedia dengan mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali diperoleh dari media atau debat publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pasar, pengembangan dan perencanaan pasar, diketahui bahwa penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan ahli pengelolaan pasar, kualitas pelayanan belum mencapai tingkat yang diinginkan oleh pedagang, karena petugas bergantung pada tempat yang ada dan infrastruktur, tidak semua permasalahan dapat diatasi di Pasar Sei Sikambang, hal ini dikarenakan pihak dinas terus mengkaji permasalahan mana yang perlu segera diatasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produktivitas PUD Pasar Kota Medan dalam mengelola pasar pada pangsa pasar Pasar Sei Sikambing masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Target pembayaran pasar ditetapkan tidak tercapai karena petugas tidak maksimal memungut retribusi dari pedagang.

Responsivitas dalam pengelolaan Pasar Sei Sikambing masih kurang optimal dikarenakan kebutuhan para pedagang belum terpenuhi. Hal ini dilihat dari keluhan-keluhan dari para pedagang yang lambat direspon oleh pengelola pasar. Pengawasan yang rutin dilaksanakan di pasar sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun hambatan yang dimiliki adanya kurangnya sumber daya manusia anggaran yang terbatas untuk mengelola pasar tradisional di Kota Medan sehingga terjadinya ketimpangan pelayanan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran mengenai manajemen pemasaran perusahaan saham gabungan di pasar regional. (Studi Kasus: Pasar Sei Sikambing).

1. PUD Pasar Kota Medan lebih meningkatkan produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas. Dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja yang baik
2. PUD Pasar Kota Medan meningkatkan lagi pengawasan secara intensif dan memberitahukan kepada para pedagang agar para pedagang mengikuti aturan demi kenyamanan bersama.
3. Pengelolaan Retribusi pasar ke depan harus dimaksimalkan agar realisasi pendapatan retribusi pasar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan pendapatan daerah.
4. Pemerintah Kota Medan segera mengesahkan Peraturan No. 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi dan Aktivitas Pedagang Kaki Lima sehingga dapat mewujudkan penataan PKL lebih baik lagi.
5. Pemerintah Daerah Kota Medan berkontribusi untuk menyediakan pemasok barang-barang yang dijual agar para pedagang mendapatkan harga yang lebih murah dan dapat berdaya saing dengan pasar-pasar modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, A. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Caroline, C. (2010). Potensi Kecamatan Salem dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, 11(1), 73-97.
- Dwiyanto, A. (2006), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.
- Ghofur. (2014). *Manajemen Publik pada Pemerintah*, Jakarta : Bumi Angkasa.
- Handoko, T. H. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, M. S. (2017). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2004). Pokok-pokok pikiran perbaikan sistem manajemen SDM PNS di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 8(2), 15-33.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: BPFEYogyakarta.
- Moehariono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Natika, L. (2017). Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang. *JIA Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNSUB*, 19(1), 38-55.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

- Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Medan
- Stanton, W. (2000). *Prinsip Pemasaran Jilid 1 ; Penerjemah Yohanes Lamarto*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfab
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Cet ke-20*. Jakarta : PT.RajaGrafindo
- Tangkillisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Terry , G. R. dan Leslie W. R. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. G.A Ticoalu. 2000. Jakarta: Bumi Aksara
- Widoatmodjo, S. (2015). *Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta : Gramedia